

**Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata “Waduk Bendo” di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro**

**Della Dwi Nanda<sup>1</sup>, Ahmad Suprastiyo<sup>2</sup>, Junadi<sup>3</sup>**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bojonegoro

delladwn17@gmail.com<sup>1</sup>, tiyopras207@gmail.com<sup>2</sup>, junadiunigoro2017@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The concept of collaborative governance explains that basically the need to collaborate arises from the interdependent relationship between parties. The success of the tourism development process cannot be separated from the attachment between stakeholders. This research aims to describe how collaborative governance in the process of developing Bendo reservoir tourism. This research uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using field studies conducted directly to the research location through observation, interviews and documentation. This research uses the theory put forward (Ratner, 2012), namely: Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, Planning Collaborative Action and refined with the success criteria (Goldsmith and Kettl, 2009: 135-136) of a collaboration in governance, namely Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The results showed that collaborative governance in the development of bendo reservoir tourism in bendo village, Kapas sub-district, Bojonegoro Regency has not run optimally. This can be seen from the success indicators that are not achieved, namely the absence of official written regulations that bind the collaboration process that is carried out, commitment in achieving goals that are not carried out by all stakeholders involved, limited human resources and lack of budget funds to build infrastructure.*

**Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Tourism Development**

**ABSTRAK**

Konsep collaborative governance menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak. Keberhasilan proses pengembangan wisata tidak lepas dari adanya keterikatan antara stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan wisata waduk Bendo. Penelitian ini menggunakan metode *penelitian kualitatif* deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang dilakukan secara langsung terjun ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan (Ratner, 2012) yaitu : *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, Planning Collaborative Action* dan disempurnakan dengan kriteria keberhasilan (Goldsmith dan Kettl, 2009:135-136)

sebuah kolaborasi dalam governance, yaitu *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resourch*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan wisata waduk bendo di desa bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari indicator keberhasilan yang tidak tercapai yaitu tidak adanya peraturan tertulis resmi yang mengikat proses kolaborasi yang dijalankan, komitmen dalam mencapai tujuan yang tidak dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran dana untuk membangun sarana prasarana.

**Kata kunci : Collaborative Governance, Stakeholders, Pengembangan Wisata**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam beraneka ragam sehingga Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022, 2022). Perkembangan pariwisata yang pesat di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya warga negara lain yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk menikmati alam Indonesia. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata berkewajiban untuk bisa menjamin agar hak setiap manusia dalam berwisata dapat terpenuhi guna meningkatkan kesejahteraan serta persahabatan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pariwisata yang dikembangkan dengan optimal mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di negara berkembang, seperti di Indonesia. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022, 2022) tentang pemberdayaan wisata, wisata berbasis desa atau dikenal dengan desa wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Pengembangan pariwisata yang baik dan benar tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata sangatlah penting, seperti penyediaan akses jalan, fasilitas-fasilitas, mencari wisatawan dengan cara mempromosikan wisata tersebut. Pengelolaan wisata yang berhasil mampu meningkatkan devisa negara, menumbuhkan industri pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja. Pariwisata memiliki banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem, yang secara umum insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah (Asurah & Wibawani, 2023). Hal tersebut sejalan dengan paradigma governance dalam ilmu administrasi negara melalui pendistribusian

sebagian kewenangan pemerintah kepada kelompok lainnya sehingga terwujud sinergitas dalam tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Menurut Ansell & Gash (2008), collaborative governance adalah proses mengambil keputusan secara bersama-sama yang terdiri dari satu atau lebih lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lembaga non pemerintah dengan tujuan melaksanakan implementasi kebijakan publik dan mengelola asset publik. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Collaborative governance merupakan upaya kerja sama berbagai stakeholders dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan konsep tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata waduk desa bendo dan tercipta sinergitas antara masyarakat atau komunitas, swasta, akademisi dan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi pariwisata. Pariwisata yang merupakan sektor integrasi, tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada kerjasama dan daya dukung dari berbagai pihak. (Danastry & Kurniawan, 2021)

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Pengembangan wisata kampung bandar berbasis collaborative governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru” yang diteliti oleh (Priono & Rusli, 2023) menjelaskan bahwa pengembangan wisata berbasis collaborative governance berjalan dengan baik namun mengalami beberapa kendala diantaranya adalah komunikasi antar pihak yang berjalan kurang efektif dan tidak adanya kebijakan tertulis yang berguna untuk memahami tanggungjawab dimana hal tersebut berpengaruh pada keberlanjutan pengembangan wisata.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Collaborative Governance dalam pengembangan wisata hutan bambu putih keputih di kota Surabaya” yang diteliti oleh (Hariyoko, 2023) menjelaskan bahwa dalam pengembangan wisata terjalin komunikasi yang baik, sumber daya manusia pengelola sudah diatur dengan baik dan masalah finansial yang mendukung pembangunan fasilitas. Namun, kepemimpinan yang menjadi kunci dilakukan oleh DLH ternyata masih belum bisa merangkul semua pihak yang berkepentingan.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Model pengembangan potensi pariwisata dalam perspektif collaborative governance (studi di taman wisata alam wira garden)” yang diteliti oleh (Pramesti et al., 2022) menjelaskan bahwa dalam proses dialog tatap muka antara pemerintah dan masyarakat, apabila ada permasalahan di taman masyarakat langsung memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah, dalam proses mencapai komitmen, masyarakat harus mematuhi segala komitmen yang ditetapkan pemerintah demi berjalannya taman wisata tersebut.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro sering dijuluki oleh masyarakat dengan sebutan kota minyak. Selain itu, Kabupaten yang berjarak 109 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut juga memiliki beberapa wisata yang mampu menarik wisatawan, baik wisata buatan ataupun wisata alamnya. Kabupaten Bojonegoro adalah satu daerah yang mengembangkan wisata sebagai bentuk upaya memperkenalkan bojonegoro dengan masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga sudah mengesahkan (*PERDA 4 Tahun 2020-Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025, 2020*) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi: a. Pembangunan Destinasi Pariwisata, b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata, c. Pembangunan Industri Pariwisata, dan d. Pembangunan Kelembagaan.

Salah satu wisata di Bojonegoro yang mampu menarik wisatawan lokal maupun non lokal ialah "*Wisata waduk bendo*", wisata ini berada di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Wisata yang berada di Desa Bendo ini berdiri pada tahun 2017 yang awalnya dibentuk oleh karang taruna setempat dan diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018. Waduk Bendo ini merupakan bekas jalur solo valley yang digunakan sebagai pengairan sawah lalu disulap menjadi destinasi menarik. Melihat potensi yang dapat menunjang kemajuan desa Bendo, pengembangan pariwisata ini pemerintah menggunakan collaborative governance, yang mana dalam pengembangan wisata waduk Bendo melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah sampai masyarakatnya sendiri. Karang taruna dibantu dengan Pemerintah Desa Bendo terus melakukan pembangunan terhadap wisata waduk Bendo. Namun, dalam proses pembangunannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya aktor yang terlibat dalam proses pengembangan wisata waduk bendo dan juga kurangnya komunikasi oleh pihak yang terlibat sehingga manajemen yang ada tidak berjalan dengan baik. Kesadaran masyarakat setempat dalam mendukung berdirinya dan menjaga wisata tersebut juga masih dikatakan kurang, terlihat dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan wisata waduk bendo. Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh, pengunjung wisata waduk bendo pada tahun 2022-2023 hanya mencapai 10-15 orang per harinya dibandingkan dengan tahun 2018-2021 bisa mencapai kurang lebih 100 orang per harinya, yang berarti hal ini menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata waduk bendo makin tahun semakin berkurang. Sarana dan prasarana di wisata waduk bendo sudah banyak yang rusak dan hanya beberapa saja yang masih digunakan. Dalam hal ini, peran karang taruna dalam menjaga sarana dan prasarana kurang maksimal. Hal ini yang menyebabkan para wisatawan enggan untuk berkunjung ke wisata waduk bendo. Dengan ini, penerapan collaborative governance dalam pengembangan wisata waduk bendo masih mengalami kendala khususnya kurangnya keterikatan peran para stakeholders yang masih dikatakan belum maksimal. (Hasil wawancara penulis)

Berdasarkan konsep collaborative governance, dijelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak. Collaborative governance juga dapat dijelaskan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui perspektif collaborative governance, maka konsep tersebut diharapkan mampu menjadi pemecah masalah dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Penelitian collaborative governance telah dilakukan di bidang pariwisata, tetapi identifikasi proses dan keberhasilan dalam pengembangannya belum banyak dilakukan. (Soenarjanto, 2019)

Menurut Ratner, 2012:5(Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020), dalam proses collaborative governance terdapat tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, yaitu :

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini para stakeholders yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pada tahap ini pula setiap stakeholders saling menerangkan mengenai apa yang menjadi permasalahan dan stakeholders lainnya saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing - masing stakeholders yang terlibat.

2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini, stakeholders yang terlibat dalam melakukan diskusi mengenai hambatan yang telah dijelaskan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh stakeholders yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah apa yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak yang mampu mendukung dalam proses penyelesaian permasalahan.

3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Pada tahap ini, stakeholders yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari tiap strategi yang telah didiskusikan sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar stakeholders yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung jangka panjang.

Dari tahapan proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ratner, (Goldsmith dan Kettl, 2009:135-136) menyempurnakan dengan menyebutkan bahwa terdapat hal - hal penting yang bisa dijadikan tolok ukur kriteria keberhasilan sebuah kolaborasi

dalam governance, yaitu *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resourch.* (Irawan Denny, 2017)

Berdasarkan uraian konsep yang disampaikan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah bagaimana proses pengembangan wisata waduk bendo dalam konsep collaborative governance dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan wisata waduk Bendo.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Creswell, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan yang dilakukan langsung terjun ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Wisata Waduk Bendo, Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pengambilan sampel tertentu sesuai dengan topik yang relevan (Subagja, 2018). Informan dalam penelitian ini adalah Pokdarwis Desa Bendo, BUMDes Bendo, Pemerintah Desa Bendo, dan warga setempat. Data yang diperoleh merupakan hasil dari data primer yang didapatkan dari data empiris dilapangan melalui teknik wawancara secara langsung dengan berbagai stakeholders yang ada keterkaitan dengan penelitian ini dan observasi terhadap fenomena yang ada dilapangan dan data sekunder berasal dari literasi jurnal ilmiah dan dokumentasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bendo.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian yang berjudul collaborative governance dalam pengembangan wisata waduk bendo di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini penulis memperoleh hasil sesuai dengan model kolaborasi yang dikemukakan oleh (Ratner, 2012) yang dibagi menjadi tiga fokus fase atau tiga tahapan dimana tujuannya untuk melihat apa saja yang telah terpenuhi dari masing-masing tahapan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan (Sihaloho, 2022). Pada tahap awal ini yang menjadi pencetus ide dalam melakukan pengembangan wisata waduk Bendo ialah anggota Karang Taruna Desa Bendo. Waduk Bendo ini dahulu merupakan bekas jalur solo valley, sering digunakan pemuda setempat untuk bersantai pada sore hari. Dengan hal ini, para pemuda berinisiatif untuk menjadikan waduk tersebut tempat wisata. Waduk Bendo layak untuk dikembangkan yang mana hal ini dapat berguna untuk kemajuan desa Bendo sendiri, selain itu pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk meskipun saat siang hari sangat cocok untuk wisatawan melepas penat disini. Namun, yang menjadi hambatan awal dalam pengembangan wisata ini adalah kurangnya perhatian khusus dari pemerintah Desa setempat seperti pembiayaan dalam proses pengembangan waduk bendo sehingga menyebabkan waduk bendo berhenti melakukan pembangunan untuk beberapa waktu. Hal ini berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke waduk bendo masih sedikit. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung seperti belum adanya toilet, tempat duduk yang masih kurang, kurang tersedianya warung yang berjualan membuat masyarakat enggan untuk berkunjung ke wisata waduk bendo. Pada tahap awal proses pengembangan wisata waduk Bendo, yang sering terlibat dalam proses kolaborasi ini hanyalah karang taruna desa Bendo dan Pemerintah Desa Bendo. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa proses pengembangan wisata waduk bendo belum berjalan secara maksimal. Hasil identifikasi dan analisis sangat penting sebagai dasar penyusunan strategi dan rencana induk pengembangan wisata waduk bendo yang nantinya dapat dijadikan rekomendasi dan pertimbangan oleh pemerintah desa.

2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Fase ini dilakukan setelah melewati fase yang pertama dimana permasalahan sudah teridentifikasi, selanjutnya melakukan Langkah yang efektif untuk permasalahan tersebut (Sihaloho, 2022). Setelah permasalahan teridentifikasi seperti yang dijelaskan diatas pada fase pertama, Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Desa Bendo adalah melakukan musyawarah dengan karang taruna Desa Bendo dan beberapa perangkat Desa Bendo. Pada fase dialog ini, Pemerintah Desa Bendo dengan melihat keaktifan pemuda karang taruna Desa Bendo sehingga Pemerintah Desa Bendo melakukan pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) guna membantu selama proses pengembangan wisata waduk Bendo. Selain itu, Pemerintah Desa Bendo juga melibatkan BUMDes Bendo dalam proses pengembangan wisata waduk Bendo. Pemerintah Desa Bendo berharap dengan adanya pemangku utama antara Karang

Taruna, POKDARWIS, dan BUMDes dalam upaya pengembangan wisata waduk Bendo dapat berjalan sesuai dengan apa yang akan direncanakan nantinya.

### 3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melakukan fase pertama dan kedua, selanjutnya para stakeholders melakukan perencanaan mengenai penerapan dari strategi yang telah didiskusikan sebelumnya, Langkah awal yang dilakukan yaitu para stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan (Sihaloho, 2022). Perencanaan tindakan kolaboratif dari pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan wisata waduk Bendo adalah bagian dari tahap ini. Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan melibatkan para stakeholders dalam proses perencanaan pengembangan wisata. Perencanaan ini disusun secara sistematis yang memuat tugas pokok dan fungsi stakeholders yang terlibat. Misalnya POKDARWIS sebagai pengelola wisata, Karang Taruna sebagai penjaga keamanan dan pengawasan fasilitas yang ada di area wisata, BUMDes sebagai pengelolaan pendapatan asli desa (PAD), masyarakat desa sebagai penunjang adanya wisata tersebut dengan membentuk lapak jualan yang disediakan di area wisata dan Pemerintah Desa Bendo yang terus melakukan pengarahan untuk perencanaan-perencanaan selanjutnya.

Setelah melakukan proses Analisa tahapan collaborative governance sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh (Ratner, 2012), Langkah selanjutnya adalah menilai keberhasilan penerapan proses kolaborasi dalam pengembangan wisata waduk Bendo di desa Bendo, kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Adapun Analisa yang menjadi indikator keberhasilan dalam proses collaborative governance yang dikemukakan oleh (Goldsmith dan Kettl, 2009:135-136), berikut penjelasannya :

#### a. Networked structure ( Struktur Jaringan)

Networked Structure merupakan hubungan terstruktur antar instansi yang sesuai satu dengan lainnya dan secara Bersama-sama mencerminkan unsur jaringan yang ditangani. Dalam hubungan satu dengan lainnya tidak saling membawahi (hirarki) atau lebih berkuasa/mendominasi satu atas yang lainnya. Semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan Bersama (Irawan Denny, 2017). Dalam hasil penelitian ini, terlihat tidak adanya hirarki yang terjadi dalam proses collaborative governance pengembangan wisata waduk Bendo. Kolaborasi yang terjadi hanya sebatas kesepakatan bersama tanpa adanya perjanjian tertulis. Pelaksanaan kolaborasi yang terlibat dalam proses collaborative governance pengembangan wisata waduk Bendo adalah Pemerintah Desa Bendo, POKDARWIS Bendo, BUMDes Bendo, Karang Taruna

Desa Bendo, dan masyarakat setempat yang memiliki lapak jualan di Kawasan wisata waduk Bendo. Pada awal proses kolaborasi para stakeholders yang terlibat dalam menjalankan tugas berjalan dengan baik dan sesuai arahan, namun seiring berjalannya waktu tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

b. *Commitmen to a common purpose (Komitmen dalam mencapai tujuan)*

*Commitmen to a common purpose* merupakan alasan yang penting mengapa sebuah network atau jaringan harus ada karena untuk mencapai komitmen dengan tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara Bersama-sama. Komitmen yang terjalin tidak boleh memihak hanya pada salah satu stakeholders, komitmen yang terjalin dalam proses kolaborasi harus untuk kepentingan Bersama melalui solusi Bersama. Dengan ini, peneliti memperoleh data bahwa komitmen yang terjalin antara stakeholders yang satu dengan yang lainnya tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi telah ditentukan di awal (Rivelino & Ginting, 2020). Komitmen Pemerintah Desa Bendo terhadap pengembangan wisata waduk Bendo dengan melakukan evaluasi terhadap perkembangan wisata waduk bendo bersama stakeholders lainnya, evaluasi dilaksanakan minimal 1x dalam sebulan. POKDARWIS sebagai pengelola wisata yang sekaligus menjadi penanggung jawab dalam pengembangan wisata waduk Bendo telah melakukan musyawarah dengan stakeholders lainnya mengenai bagaimana wisata waduk Bendo lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat lokal maupun non lokal, misalnya dengan cara membuat akun sosial media seperti Instagram dan facebook serta membuat spot foto unik, arena outbond dan games. BUMDes sebagai pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) berkomitmen dengan cara memberikan tarif untuk tiket masuk ke wisata waduk Bendo dan tarif untuk persewaan perahu. Namun, karang taruna desa Bendo yang seharusnya sebagai penjaga keamanan dan pengawasan fasilitas tidak berkomitmen penuh terhadap tugas yang diberikan, hal ini diilihat dari rusaknya beberapa spot foto dan tidak terawatnya arena games. Tak hanya itu, karang taruna yang sudah terjadwal untuk berjaga di wisata tersebut tidak dijalankan dengan baik, ini dikarenakan ada beberapa yang juga bekerja di tempat lain. Masyarakat yang juga tidak membuka lapak jualan setiap hari.

c. *Trust Among the Participants (Kepercayaan diantara para stakeholders)*

*Trust Among the Participants* merupakan hubungan profesional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stakeholders harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin

untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif (Firdaus, M; Isabella, M; N.S, 2022). Proses kolaborasi dalam pengembangan wisata waduk bendo harus terjalin antara aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Desa Bendo, POKDARWIS Desa Bendo, BUMDes Bendo, Karang taruna Desa Bendo, dan masyarakat setempat. Kolaborasi yang dijalankan sudah mulai menjalin kepercayaan antara stakeholders satu dengan yang lainnya. Para stakeholders memiliki hubungan personal yang baik untuk mencapai tujuan bersama serta kepentingan bersama yang sudah menjadi fokus pada setiap aktor yang terlibat. Stakeholders yang terlibat harus ada rasa saling percaya, jika mereka saling curiga, memfitnah bukti bahwa kolaborasi sudah tidak sehat (Sudarmo, 113: 2011). Dengan ini, kolaborasi dalam pengembangan wisata waduk bendo sudah ada rasa percaya diantara para stakeholders.

d. Governance

Governance merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor governance atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan governance apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota. Governance dalam konsep collaborative governance digunakan sebagai indikator ukuran keberhasilan. Dalam proses kolaborasi pengembangan wisata waduk Bendo tidak dijelaskan mengenai struktur keanggotaan yang disertai aturan hukum yang mengikat. Proses kolaborasi yang dijalankan hanya sesuai dengan peran dan tugas masing-masing stakeholders tanpa adanya peraturan tertulis (Risanti & Winarni, 2018). Menurut DeSeve (2007) dalam Sudarmo dikatakan bahwa governance harus mempunyai batas, aturan yang mengatur sanksi dalam berjalannya suatu kolaborasi. Namun, pada proses kolaborasi ini tidak ada regulasi yang berisi tentang pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan apabila berperilaku menyimpang. Setiap stakeholders diberikan kebebasan untuk membantu proses kolaborasi dalam pengembangan wisata waduk bendo namun tetap mengacu pada kesepakatan bersama. Dukungan para stakeholders tanpa konflik dalam pencapaian tujuan masih dikatakan belum maksimal, terlihat dari terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola wisata tersebut serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dan minimnya sumber daya keuangan yang dialokasikan dalam pengembangan Wisata waduk bendo.

e. Access to Authority (Akses terhadap otoritas)

Access to Authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan

kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya (Irawan Denny, 2017). Dalam konteks kolaborasi yang terjadi selama proses pengembangan wisata waduk Bendo, para stakeholders yang terlibat sudah memahami bagaimana prosedurnya serta mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

f. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas/responsibilitas)

*Distributive Accountability / Responsibility* merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersamaan dengan stakeholders dan berbagi tanggung jawab serta pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, dalam pemerintahan kolaboratif masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan dan memperoleh pembagian tanggung jawab yang jelas (Firdaus, M; Isabella, M; N.S, 2022). Proses kolaborasi dalam pengembangan wisata waduk Bendo, pemerintah Desa bendo sudah membagi tugas dan peran masing-masing stakeholders sesuai dengan bidangnya. Pembagian akuntabilitas oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing stakeholders. Pertemuan yang dilaksanakan pemerintah Desa Bendo dalam satu bulan sekali sebagai wadah diskusi diharapkan semua stakeholders hadir dalam evaluasi tersebut. Namun, kenyataannya tidak semua stakeholders mengikuti evaluasi tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya pembagian akuntabilitas karena salah satu stakeholders kurang berpartisipasi.

g. *Information sharing* (Berbagi informasi)

*Information Sharing* merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing stakeholders (Risanti & Winarni, 2018). Kolaborasi pengembangan wisata waduk Bendo sudah memiliki kemudahan dalam akses informasi. POKDARWIS sebagai pengelola wisata sudah melakukan forum komunikasi dengan stakeholders lainnya dan mendiskusikan sejauh mana proses pengembangan wisata waduk bendo serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi. Selanjutnya, hasil dari diskusi tersebut disampaikan pada saat evaluasi yang dilakukan pemerintah desa bendo dalam sebulan sekali. Meskipun evaluasi tidak rutin tatap muka yang dilakukan dalam per bulannya, para stakeholders dapat melihat perkembangannya melalui media sosial. Dalam hal ini, *information sharing* dalam proses pengembangan wisata waduk bendo sudah dilakukan oleh masing-masing stakeholders.

h. Access to Resourch (Akses terhadap sumber daya)

Access to Resources merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing stakeholders yang terlibat. Suatu program ataupun kegiatan dapat berjalan ketika di didukung oleh sumberdaya yaitu terutama ketersediaan keuangan dan manusia(Irawan Denny, 2017). Dalam hal ini, kurangnya sumber daya dalam mengembangkan wisata timbul karena kesadaran masyarakat sekitar yang masih cukup kurang, contohnya dalam menjaga kebersihan tempat wisata. Saat ini sumber daya manusia hanya terbatas pada POKDARWIS. Karang taruna pun yang seharusnya ikut aktif dalam mendukung proses pengembangan wisata ini juga masih kurang aktif. Kerbatasan dana juga menjadi sumber daya yang penting dalam proses pengembangan ini, infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan para wisatawan enggan berkunjung yang mana ini bisa menjadi dampak kurangnya pendapatan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak, sehingga memerlukan bantuan dana dari pihak pemerintah maupun swasta.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdarkan hasil penelitian yang berjudul “collaborative governance dalam pengembangan wisata waduk bendo di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojoengoro” dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengembangan telah terjadi proses kolaborasi antara stakeholders yang saling mendukung namun belum sepenuhnya berhasil. Hal ini berdasarkan analisis terhadap delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi menurut (Goldsmith dan Kettl, 2009:135-136) yang tidak tercapai yaitu tidak adanya peraturan tertulis resmi yang mengikat proses kolaborasi yang dijalankan, komitmen dalam mencapai tujuan yang tidak dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran dana untuk membangun sarana prasarana. Berdasarkan hasil uraian penelitian dan penarikan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan proses kolaborasi kedepannya. Untuk mendukung keberhasilan proses pengembangan wisata waduk Bendo perlu dilakukan peningkatan sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona kepada seluruh masyarakat di Desa Bendo, pembinaan terhadap POKDARWIS yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, restrukturisasi pengelola wisata untuk pembaharuan sumber daya manusia, pemerintah desa memberi perhatian khusus dalam menunjang kemajuan potensi desa, seperti memberikan anggaran khusus.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance Pengembangan Objek Wisata Air Embung “Bandung Bondowoso” Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3206>
- Creswell. (2013). Bagaimana Simbol Komunikasi Pada Kelompok Touring? *Studi Interaksi Simbolik Pada Anggota Komunitas Fast Rider Di Bandung*, 71–92.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *JlAP (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik)*, 7(2), 158–163.
- Firdaus,M; Isabella, M; N.S, N. (2022). Collaborative Governance Sebagai Langkah Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Karimun. *Journal of Comprehensive Science*, 1(3), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Hariyoko, Y. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Bambu Keputih Di Kota Surabaya. *Reformasi*, 13(1), 140–148. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3876>
- Irawan Denny. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya ). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022. (2022). *Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan*. 132450, 132450–132456.
- PERDA 4 Tahun 2020-Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025. (2020).
- Pramesti, D., Sulistio, E. B., & ... (2022). Model Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Di Taman Wisata Alam Wira Garden). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 115–124.
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Tambusai*, 7(2), 16011–16017.

- Risanti, F., & Winarni, F. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. *Adinegara*, 291–302. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/adinegara/article/viewFile/12670/12211>
- Rivelino, R., & Ginting, A. H. (2020). Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid -19 Dki Jakarta. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 36–51. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1027>
- Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>
- Soenarjanto, B. (2019). PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(3), 1–9.
- Subagja, D. (2018). Gaya Komunikasi Ketua Sakamichi Squad Bandung (Ssb) Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggotanya. *Unikom*, 2009, 49–63.